

BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR: 219 / BPBD/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan Percepatan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang rentan terhadap penyebaran Covid 19 (Corona Virus Disease 2019);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusam Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 10. Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);
- 13. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona (COVID-19) di Wilayah Virus Disease 2019

2020, sebagaiman tecantum Bengkayang Tahun

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

mepunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha,

akademisi, masyarakat dan media.

KETIGA Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA

mempunyai fungsi:

a. Meningkatkan ketahanan Nasional di Bidang Kesehatan;

b. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi/ Kemasyarakatan/ Agama/ dan Swasta lainnya se Kabupaten Bengkayang;

- c. Meningkatkan antisipasi penularan, peningkatan/ penambahan dan penyebaran COVID-19;
- d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19.

KEEMPAT : Uraian tugas dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 tercantum dalam lampiran II

Keputusan ini.

KELIMA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) sebagaimana vang dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 67 (enam puluh tujuh) hari terhitung sejak

tanggal 30 Maret 2020 hingga tanggal 14 Juni 2020.

KEENAM : Segala Biaya Akibat Diterbitkannya Surat Keputusan ini

Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan

Bupati Nomor 178/BPBD/TAHUN 2020, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal, 3 Maret 2020

SUPATI BENGKAYANG,



1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;

2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : **279** /BPBD/TAHUN 2020

TANGGAL: **30 Maret** 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN

BENGKAYÁNG TAHUN 2020

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

| NO | JABATAN POKOK/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM GUGUS | |
|-----|--|------------------------------|--|
| INO | JABATAN POKOK/INSTANSI | TUGAS | |
| 1. | Bupati Bengkayang | Ketua | |
| 2. | Dandim 1202 Bengkayang | Wakil Ketua 1 | |
| 3. | Kapolres Bengkayang | Wakil Ketua 2 | |
| 4. | Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang | Wakil Ketua 3 | |
| 5. | Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang | Wakil Ketua 4 | |
| 6. | DANLANUD Harry Hadi Soemantri Sanggau Ledo | Wakil Ketua 5 | |
| 7. | Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang | Wakil Ketua 6 | |
| 7. | Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang | Sekretaris | |
| 8. | Asisten I Sekda.Kabupaten Bengkayang | Sekretaris I | |
| 9. | Asisten II Sekda.Kabupaten Bengkayang | Sekretaris II | |
| 10. | a. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD | | |
| | Kabupaten Bengkayang | | |
| | b. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten | Akuntabilitas dan pengawasan | |
| | Bengkayang | | |
| | c. Inspektur Kabupaten Bengkayang | | |
| 11. | a. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten | | |
| | Bengkayang. | | |
| | b. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten | | |
| | Bengkayang. | Humas | |
| | c. Ketua PWI Kabupaten Bengkayang | | |
| | d. Border TV Kabupaten Bengkayang | | |
| | e. Ruai TV | | |
| 12. | a. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang | | |
| | b. Kasubag Renja BPBD Kabupaten Bengkayang | | |
| | c. Direktur Akademi Bumi Sebalo | | |
| | d. Direktur Akper Betesda Serukam | Perencanaan, data, pakar dan | |
| | e. Direktur STIM Shanti Buana | analisis | |
| | f. Ketua IDI Kabupaten Bengkayang | | |
| | g. Ketua PPNI Kabupaten Bengkayang | | |
| | h. Ketua IBI Kabupaten Bengkayang | | |
| 13. | a. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga | | |
| | Berencana Kabupaten Bengkayang | | |
| | b. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang | | |
| | c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten | | |
| | Bengkayang | Operasi Pencegahan, | |
| | d. Kepala Dinas Pengan, Pertanian dan | Penanganan, Pemulihan dan | |
| | Perkebunan Kabupaten Bengkayang | layanan dasar | |
| | e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | Kabupaten Bengkayang | | |
| | f. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika | | |
| | Kabupaten Bengkayang | | |

| | g. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan | |
|-----|---|-------------------------------|
| | Perempuan dan Perlindungan anak | |
| | Kabupaten Bengkayang | |
| | h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan | |
| | _ | |
| | Ruang Kabupaten Bengkayang | |
| | i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | Kabupaten Bengkayang | |
| | j. Kabid Damkar BPBD Kabupaten Bengkayang | |
| | k. Kabag Ops Polres Bengkayang | |
| | 1. Pasi Ops Kodim 1202 Singkawang Perwakilan | |
| | Bengkayang | |
| | m.Camat Se-Kabupaten Bengkayang | |
| | n. Danki 645 Bengkayang | |
| | o. Dandenzipur Kabupaten Bengkayang | |
| | p. DanPol Airud Teluk Suak Kabupaten | |
| | Bengkayang | |
| | q. Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang | |
| | r. Direktur RSUD Sebalo Kabupaten | |
| | Bengkayang | |
| | s. Kepala Kementrian Agama Kabupaten | |
| | Bengkayang | |
| | t. Ketua IDI Kabupaten Bengkayang | |
| | u. Ketua PPNI Kabupaten Bengkayang | |
| | v. Ketua IBI Kabupaten Bengkayang | |
| | w. Kepala Kantor Bea Cukai Jagoi Babang | |
| | x. Kepala Kantor Imigrasi Jagoi Babang | |
| | y. Tokoh Masyarakat Kabupaten Bengkayang | |
| | z. Tokoh Agama Kabupaten Bengkayang | |
| | å. PMI Kabupaten Bengkayang | |
| | ä. WVI Kabupaten Bengkayang | |
| 14. | a. Pasi Ops Kodim 1202 Singkawang Perwakilan | |
| | Bengkayang | |
| | b. Kabag Ops Polres Bengkayang | Pengamanan dan Penegakan |
| | c. Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten | Hukum |
| | Bengkayang | |
| 15. | a. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang | |
| | b. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan | |
| | Perkebunan Kabupaten Bengkayang | |
| | c. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan | |
| | Kabupaten Bengkayang | |
| | d. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan | |
| | Perempuan dan Perlindungan anak | |
| | e. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga | |
| | Berencana Kabupaten Bengkayang | Logistik, Penyiapan Potensi |
| | f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan | sumber daya daerah, Penyiapan |
| | Kabupaten Bengkayang | dan penggunaan alat kesehatan |
| | g. Pasi Logistik Kodim 1202 Singkawang | |
| | Perwakilan Bengkayang | |
| | h. Ketua IDI Kabupaten Bengkayang | |
| | i. Direktur Bank Kalbar Cabang Bengkayang | |
| | j. Direktur Bank Kaibar Cabang Bengkayang | |
| | k. Direktur Bank BNI Cabang Bengkayang | |
| | Kepala CU Pancur Kasih Bengkayang | |
| | 1. Repaia Co Fancui Rasin Delighayang | |
| | | <u> </u> |

| | n. | Kepala CU Bonaventura Bengkayang | |
|-----|----|---|--|
| | 0. | Ketua DAD Kabupaten Bengkayang | |
| | p. | Ketua MABM Kabupaten Bengkayang | |
| | q. | Ketua MABJ Kabupaten Bengkayang | |
| | r. | Ketua Perkumpulan Batak Kabupaten | |
| | | Bengkayang | |
| | S. | Ketua Perkumpulan Madura Kabupaten | |
| | | Bengkayang | |
| 16. | a. | Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang | |
| | b. | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset | |
| | | Daerah Kabupaten Bengkayang | |
| | c. | Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga | |
| | | Berencana Kabupaten Bengkayang | Adminstrasi dan Keuangar |
| | d. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, | |
| | | Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal | |
| | e. | Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang | |
| | f. | Direktur Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang | a de la companya de l |
| 17. | a. | Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang | |
| | b. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten | |
| | | Bengkayang. | Pusdalops |
| | c. | Kepala Dinas Kominfo Kabupaten | • |
| | | Bengkayang | |



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : **219** /BPBD/TAHUN 2020

TANGGAL: **30 Maret** 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

URAIAN TUGAS DALAM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019

1. Ketua

memiliki tugas:

- a. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Provinsi.

Wakil Ketua

Memiliki Tugas:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan Tugas-Tugas ketua sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- b. Mengerahkan sumber daya yang ada dibawah kewenangannya untuk membantu tugas-tugas ketua.
- c. Mengkoordinir secara teknis pelaksanaan tugas bagian atau bidang yang tergabung dalam gugus tugas.
- d. Melaporkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Gugus Tugas kepada Bupati sebagai ketua.

3. Sekretaris

memiliki tugas:

- a. administrasi surat menyurat;
- b. kegiatan protokoler;
- c. dukungan sekretariatan
- 4. Akuntabilitas dan pengawasan

memiliki tugas melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.

5. Humas

memiliki tugas:

- a. komunikasi publik;
- b. agenda setting;
- c. strategi komunikasi;
- d. media monitoring;
- e. juru bicara
- 6. Perencanaan, data, pakar, dan analisis

memiliki tugas:

- a. pengumpul data;
- b. analisa;
- c. kajian;
- d. policy brief;
- e. protokol kabupaten;

f.perencanaan; dan

- g. laporan capaian
- 7. Operasi Pencegahan, Penanganan, Pemulihan dan Layanan dasar memiliki tugas melaksanakan :
 - a. Pencegahan

memiliki tugas melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

- b. Penanganan
 - memiliki tugas melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- c. Pemulihan dan layanan dasar memiliki tugas melaksanakan pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- 8. Pengamanan dan Penegakan Hukum memiliki tugas melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- 9. Logistik, Penyiapan Potensi sumber daya daerah, Penyiapan dan penggunaan alat kesehatan
 - memiliki tugas memberi dukungan pengadaan logistik dan peralatan darurat di daerah terdampak, meliputi :
 - a. Penyiapan potensi sumber daya daerah memiliki tugas melaksanakan mobilisasi dan pengerahan sumber daya daerah.
 - Penyiapan dan penggunaan alat kesehatan memiliki tugas menyediakan logistik dan peralatan kesehatan darurat di daerah.
- 10. Administrasi dan Keuangan

memiliki tugas:

- a. Penatausahaan administrasi keuangan;
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan
- 11. Pusdalops

memiliki tugas:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data (data base);
- b. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik;
- c. Pelaporan.

